

Beyond The Call of Duty : Masih Adakah Saat Ini?

Adrianus Meliala*



Abstrak :

Sebagai organisasi dengan ciri paramiliter, personel Polri hanya menjadi salahsatu instrumen organisasi yang harus siap ditempatkan dimana saja, kapan saja dan untuk tugas apa saja. Merupakan kemewahan di Polri sekarang untuk bicara mengenai “bekerja melebihi panggilan tugas”. Konon, semua sekarang bekerja seadanya saja, tak mau ambil resiko dan juga tak mau dikatakan sok pahlawan. Iklim kerja di Polri yang cenderung tidak memihak personel akan menyurutkan moral kerja dari cukup banyak personel berusia muda yang masih idealis dan berapi-api guna mengadakan perubahan. Sulitnya membangun organisasi polisi yang personelnnya sehari-harinya terekspose dengan kehidupan masyarakat secara amat kental.

Kata Kunci : Personel, tugas, kewajiban, moral kerja

Pendahuluan

Untuk suatu organisasi besar seperti Polri, nampaknya telah terjadi suatu ekuilibrium dimana tugas dan fungsi bisa tercapai tanpa andil peran perseorangan dari para personelnnya yang sebesar dulu. Bila dulu jumlah polisi terbatas, demikian pula peralatan kerja serta anggarannya, maka kini hampir semuanya telah berubah. Ada begitu banyak personel yang kini terlibat dalam organisasi Polri, melalui 1500-an jabatan yang sengaja diciptakan guna mencapai tujuan organisasi. Eksistensi seorang personel dewasa ini semakin terbatas atau dibatasi pada kotak jabatan yang didudukinya saja.

Apa yang terjadi jika personel tersebut pensiun atau meninggal? Dengan mudah dapat dicari penggantinya. Demikian pula jika pejabat lama dimutasi, dalam hitungan hari bisa ditunjuk

orang lain dengan kualifikasi setara. Dalam situasi itu, seorang pejabat tidak bisa dan tidak dapat mengembangkan hubungan emosional antara dirinya dan jabatannya, apalagi menganggap sebagai “miliknya”. Mengapa begitu? Sebagai organisasi dengan ciri paramiliter, personel Polri hanya menjadi salahsatu instrumen organisasi yang harus siap ditempatkan dimana saja, kapan saja dan untuk tugas apa saja.

Situasi ini lalu berpotensi menjadikan beberapa kalangan yang merasa tidak “ditempatkan” dalam jabatan yang pas, lalu merasa tidak bermotivasi, kehilangan semangat kerja dan bahkan kehilangan harapan hidup. Apabila di organisasi non-paramiliter hal itu dapat diatasi dengan mudah, misalnya dengan minta dievaluasi ulang atau melamar kerja di tempat lain, tidak demikian halnya di Polri. Perintah ya perintah.

* Prof. Dr. Adrianus Meliala; Kriminolog Universitas Indonesia / Pengamat Kepolisian, adrianus@ui.ac.id.

Tulisan ini selanjutnya membahas tentang dinamika yang nampaknya hidup dalam tubuh organisasi dan komunitas kepolisian di Indonesia terkait peran dan tugasnya sebagai abdi negara, abdi masyarakat, penegak hukum dan pemelihara kamtibmas.

Etos dan integritas diri

Dalam rangka memilih pekerjaan, karier atau profesi (ketiganya tidak sama persis), maka sebenarnya cukup bervariasi motivasi orang dalam memilih satu dari yang lain. Ada yang menekankan pada besarnya gaji yang diterima, ada pula yang menekankan pada keterjaminan pemasukan bahkan setelah masa pensiun menjelang. Selanjutnya, selalu menarik untuk mengetahui motivasi seorang anak muda saat memilih menjadi aparat negara, entah sebagai aparat keamanan yang anggota TNI atau sebagai penegak hukum seperti anggota Polri maupun korps berseragam lainnya. Mengapa menarik, mengingat pada umumnya pekerjaan mereka berat dan menantang maut, di pihak lain gaji yang diterima relatif kecil.

Lebih jauh lagi, pada kalangan ini, juga dituntut aktivasi dari etos dan integritas diri. Hal ini mengingat, sebagai anggota Polri misalnya, seorang personel memiliki kewenangan represif sekaligus peralatan represif pula. Apabila kewenangan dan peralatan itu disalahgunakan, implikasinya akan mengerikan.

Apa itu etos dan integritas? Apabila etos berbicara tentang bagaimana cara bekerja yang benar (bersifat *inward control*), maka integritas mengatur tentang bagaimana seorang personel seharusnya bersikap tatkala berhubungan dengan berbagai pihak (bersifat *outward control*). Kedua hal itulah yang lebih dituntut dari para pelaksana tugas keamanan, bukan soal kemampuan mengetik atau rajin-tidaknya masuk kantor. Dan khusus apabila sang aparat juga telah berada pada posisi pembuat kebijakan,

maka tekanan untuk memperhatikan etos dan integritas tersebut akan semakin besar dan berat ketimbang personel berpangkat rendah.

Selanjutnya, bahwa baik itu personel biasa, personel yang disiapkan menjadi pimpinan (seperti lulusan Akpol atau Akmil) ataupun personel yang sudah masuk level perwira tinggi, sebenarnya masing-masing memiliki elan sendiri-sendiri untuk memilih hendak berkinerja sekadarnya atau tampil sebaik mungkin. Demikian pula bila ingin bekerja melebihi panggilan tugas (*beyond the call of duty*).

Apabila konteks “melebihi panggilan tugas” itu dikalangan Brimob bisa diartikan sebagai tewas dalam suatu kontak tembak, maka bagaimana konteksnya bagi seorang kasatwil, kabag logistik atau tenaga fungsional forensik? Tidak mudah memang mengingat, seperti telah disebut, kotak jabatan dan uraian tugasnya sudah “mengurung” orang untuk tidak berbuat lebih dari itu.

Namun formula gampangya begini: apabila seorang personel dengan pangkat rendah bisa bekerja dengan optimal, jauh dari sekadar rutinitas atau “asal bapak senang”, itu sudah *beyond the call of duty*. Tetapi, itu tidak cukup bagi seorang perwira pertama lulusan Akpol. Mereka memerlukan tidak hanya optimalitas, tapi kemauan dan kemampuan membuat terobosan, inisiatif dan berpikir *out of the box*, guna dikatakan *beyond the call of duty*. Terakhir, apabila seorang pati mampu berpikir strategik, penuh etika dalam bekerja serta berintegritas tinggi, baru bisa dikatakan *beyond the call of duty*.

Mengapa “persyaratannya” berbeda-beda? Tak lain karena terdapat situasi kerja, kualifikasi diri dan tuntutan kerja yang berbeda-beda pula, hal mana membuat kriteria “bekerja melebihi panggilan tugas” juga mesti dimaknai secara relatif dan kontekstual.

Masih adakah?

Menjadi pertanyaan penulis, masih adakah personel yang di hari-hari ini mau bekerja melebihi panggilan tugas tersebut? Pertanyaan ini relevan diajukan mengingat kuatnya arus pragmatis (yang bahkan sudah mendekati negatif nampaknya) di Polri bahwa “berani berbeda itu berbahaya”, “kritis pada pimpinan alamat celaka”, “jabatan adalah segala-galanya” serta “materi dibalik jabatan basah”. Masih jauh lebih banyak lagi kiranya arus negatif yang belum disebut, yang keseluruhannya berasal dari budaya kepolisian yang telah salah-kaprah. Jangan-jangan, personel yang mau bekerja melebihi panggilan tugas dewasa ini malah dianggap tidak waras.

Pandangan ini menurut penulis pantas diangkat ketika, seperti juga waktu-waktu sebelumnya, Polri lagi-lagi disorot terkait kinerja penanganan kasus. Ambil contoh kasus Gayus Tambunan, beberapa waktu yang lalu. Penulis dalam hal ini mempertanyakan, benarkah tim independen dibawah pimpinan Mateus Salempang bekerja sekadar menjalankan perintah pimpinan ataukah telah melakukan sesuatu yang lebih dari tugas yang diembannya?

Demikian pula ketika Polri mati-matian berpendapat bahwa rekening milik 16 pati Polri yang sudah diputuskan untuk dibuka namun Polri tetap tidak mau membukanya kepada publik, itukah *wujud beyond the call of duty*? Ambil contoh lain, penanganan kasus Andi Nurpati yang walau telah bolak-balik diperiksa polisi dan tetap tak kunjung dtersangkakan oleh kepolisian, apakah penyidikny benar-benar telah bekerja *beyond the call of duty*? Juga ketika ada tersangka buron yang tak kunjung ditemukan, katakanlah Nunun Nurbaeti, sudahkah polisi bekerja melebihi panggilan tugas saat menangani hal ini.

Menurut penulis, masyarakat kini mendambakan lahirnya personel-personel yang memiliki idealisme tinggi dan mau berkorban.

Hal mana bisa terwujud melalui keberanian mengatakan apa yang benar, jujur, tidak khawatir kehilangan jabatan, tidak khawatir berbeda pandangan dengan orang lain, berpikiran maju dan sekaligus mau mendengarkan pandangan orang lain. Personel seperti inilah yang bisa disebut sebagai “pahlawan Polri” karena akan membawa organisasi besar ini kearah keharuman dan kemuliaan, bukannya yang pragmatis dan selalu ikut arus.

Kegiatan penegakan hukum (baca: kegiatan penyelidikan dan penyidikan) dalam hal ini menjadi kegiatan yang berpotensi untuk melahirkan situasi “di luar tuntutan tugas” mengingat sifatnya yang variabel, khas dari kasus ke kasus, tetapi juga rentan dengan godaan, tekanan dan bahaya. Berbeda dengan tugas-tugas di fungsi lalu-lintas misalnya, yang telah penuh dengan aneka regulasi dan tata-laksana, sehingga akan amat sulit mencari personel yang bisa dikatakan telah bekerja melebihi panggilan tugas hanya karena telah mengikuti prosedur.

Walau demikian, bukannya tak ada kemungkinan aktivitas kepolisian yang telah dikelilingi prosedur sekalipun juga dilaksanakan seadanya, tidak tuntas, kalau perlu personelnnya melakukan taktik mirip “belut” yang gampang menghilang alias meninggalkan tempat dan susah dicari.

Bukannya tak ada kilah tersedia bagi personel macam itu. Misalnya, karena menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh malah menjadikan mereka tak kunjung dipindah. Bila selama ini bekerja di Polda Papua, misalnya, maka selama itu pula mereka tidak bisa melihat tempat-tempat lain karena kantor SDM seperti “melupakan” mereka. Kilah lain, bahwa walaupun mereka rajin atau malas toh tidak akan ada pengaruhnya pada gaji. Walaupun kini ada remunerasi, sejauh ini masih berupa konsep bahwa turun-naiknya kinerja akan berpengaruh langsung pada besaran remunerasi.

Sebenarnya, yang lebih membuat jatuh etos kerja untuk melakukan sesuatu secara melebihi panggilan tugas adalah apabila ada personel yang bisa “potong kompas”. Dalam arti luas itu berarti personel yang tidak berkinerja tetapi memperoleh promosi, tidak punya *track-record* tetapi ditempatkan di jabatan “basah” dan sebagainya. Juga terhadap personel yang karena kekuatan uangnya menjadikan dirinya tidak kunjung dipindah dari jabatan basah selama ini. Terkait fenomena tersebut, dapat dipastikan seorang personel dengan semangat kerja ala Gatotkaca sekalipun akan luntur dan, untuk selanjutnya, lebih memilih bersikap minimalis saja.

Yang menarik adalah, walau semua pihak menyadari situasi itu, tetapi secara kultur hal itu tak pernah muncul ke permukaan. Yang sebaliknya amat sering muncul adalah, ungkapan-ungkapan klise perihal polisi profesional abdi masyarakat.

Penutup

Terkait moral kerja yang cenderung seadanya itu, maka menjadi benarlah anggapan bahwa merupakan kemewahan di Polri sekarang untuk bicara mengenai “bekerja melebihi panggilan tugas”. Konon, semua sekarang bekerja seadanya saja, tak mau ambil resiko dan juga tak mau dikatakan sok pahlawan. Iklim kerja di Polri yang cenderung tidak memihak personel (baca: menyalahkan personel, khususnya yang berpangkat rendah), juga menyurutkan moral kerja dari cukup banyak personel berusia muda yang masih idealis dan berapi-api guna mengadakan perubahan.

Siapa yang rugi jika situasi itu terus terjadi? Yang pasti masyarakat pada umumnya. Apabila masyarakat mengharapkan personel Polri berbuat sesuai sebutannya, Bhayangkara Negara, maka jelas hal itu tak akan terlihat ketika semua pihak sibuk mengamankan “periuk” masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Walau kepolisian dibiayai uang pajak masyarakat, tetapi kepolisian nampaknya memilih membayar secara minimal saja.

Polisi reserse memilih mencari selamat daripada duel dengan penjahat. Brimob memilih pulang ketimbang menghalau massa dan terkena timpukan. Demikian pula Polantas memilih mendingankan mobil berplat merah melanggar jalur busway ketimbang mengejar dan menegakkan aturan. Samapta juga demikian, memilih berpatroli di tempat-tempat mewah ketimbang di pemukiman kumuh yang tinggi resiko keamanannya. Dan seterusnya.

Iniilah memang sulitnya membangun organisasi polisi yang personelnya sehari-harinya terekspose dengan kehidupan masyarakat secara amat kental. Ketika di masyarakat muncul situasi penghargaan yang tinggi pada materi, itulah pula yang dialami polisi. Begitu pula ketika yang muncul adalah situasi pragmatis, ekonomistik dan kecenderungan menerabas, begitu pula Polri. Di pihak lain dan pada saat yang sama, ironisnya, masyarakat, bangsa dan negara mengharapkan mereka bertindak habis-habisan dan, kalau perlu, mengorbankan nyawanya sendiri.

Kalau begitu, lebih mudah membina kesamaptan dan kejiwakorsaan tentara? Konon ternyata, tetap tidak semudah dari apa yang kita perkirakan. (*)